

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Peranan Utama</p> <p>Tingkat Provinsi Konsep Mamminasata sebenarnya dirancah sendiri oleh warga Mamminasata. Ide ini digulirkan sejak tahun 1980 dengan disusunnya Rencana Tata Ruang Minasaupa ketika nama Makassar masih menggunakan nama Ujung Pandang, yang kemudian pada tahun 1996 berubah nama menjadi Minasamaupa dengan bergabungnya Kabupaten Takalar. Dengan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar, nama Metropolitan ini pernah pula menyangkut nama Minasamata. Pada tahun 2001 disusulkan Rencana Tata Ruang Mamminasata oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sulsel bekerjasama dengan UNHAS.</p>    <p>IDE Berbasis up mendukung Mamminasata Mamminasata (1980-2008)</p> | <p>Tahap Inisiasi 2001-2005 (Inisiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda Tata Ruang tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mamminasata • MoU oleh Gubernur Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel, DPRD Prop. Sulsel, Walikota/DPRD Makassar, Bupati/DPRD Maros, Bupati/DPRD Gowa, Bupati/DPRD Takalar • Pembentukan BKSPMM (SK Gubernur No. 860/XII/2003) • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Mamminasata | <p>Tahap Penyiapan/Implementasi 2006-2010 (Bersama dengan bantuan dari JICA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan organisasi BKSPMM dan Unit Teknis (Perda No. 16 tahun 2007) • Penyusunan konsep Perpres Metropolitan Mamminasata • Implementasi pembangunan jalan Hertasning dan Perintis Kemerdekaan • Pembentukan UPTD Mamminasata | <p>Tahap Pelaksanaan 2011- (Implementasi berkelanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perpres No 55 tahun 2011 - Penyempurnaan Database - MoU Kota Baru |
| <p>Dukungan JICA</p>  <p>Fasilitasi legalisasi, kelembagaan di tingkat Nasional</p> | <p>Master Plan Studi JICA tentang Tata Ruang Terpadu Mamminasata (2005-2006)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Studi Kelayakan oleh JICA tentang Pembangunan Jalan Arteri (2006-2008) • JICA melalui proyek SAPROF/IBIC mengadakan studi tentang Pengelolaan Sampah (2007-2008) • Proyek Kerjasama Teknis JICA untuk Peningkatan Manajemen Pembangunan Perkotaan di Kawasan Metropolitan Mamminasata (2009-2012) • Proyek Kerjasama Teknis JICA untuk Peningkatan Air Minum Mamminasata (2009-2011) • Penyusunan RDTR (Kota Lama, Sungai Tallo, Kota Baru, Kawasan Industri, Zoning Regulation Koridor Trans Sulawesi) • Penetapan Mamminasata sebagai Kawasan Strategis Nasional (PP 26/2008) | <p>Implementasi Pembangunan TPA oleh JICA Pengelolaan Sampah Regional (2011-2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Perpres No 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Mamminasata - Pembentukan SNVT Mamminasata |



PROYEK KERJASAMA TEKNIS JICA

Peningkatan Manajemen Pembangunan Perkotaan di Kawasan Metropolitan Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012



Penataan Ruang untuk Kawasan Metropolitan Mamminasata

~ Menciptakan Kawasan Metropolitan yang Nyaman untuk Dihuni untuk Generasi Masa Depan (3C - Clean, Creative and Coordinated) ~

I. Latar Belakang

Studi JICA yang dilaksanakan dari April 2005 sampai Agustus 2006 telah menyusun rencana tata ruang, pra-Studi Kelayakan untuk proyek-proyek prioritas, dan mengusulkan penguatan kelembagaan termasuk penguatan BKSPMM (Badan Kerja Sama Pembangunan Metropolitan Mamminasata) dengan penetapan "Unit Teknis". Berdasarkan usulan tersebut, BKSPMM telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan "Unit Teknis" dalam BKSPMM, yang ditetapkan pada April 2007.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Metropolitan Mamminasata (Perpres Nomor 55 tahun 2011) yang berfungsi sebagai rencana payung yang menunjukkan arahan umum tentang Rencana Tata Ruang di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Dalam rangka penguatan kapabilitas manajemen perkotaan, maka dianggap perlu untuk melaksanakan kerjasama teknis untuk penguatan kelembagaan yang meliputi penguatan sistem manajemen, penguatan aturan perundangan dan pengembangan SDM.

II. Tujuan Proyek

Meningkatkan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan di Kawasan Metropolitan Mamminasata.

III. Lokasi Proyek

Lokasi Proyek meliputi Kawasan Metropolitan Mamminasata yang meliputi satu (1) kota (Makassar) dan tiga (3) kabupaten (Maros, Gowa dan Takalar) dengan luas wilayah 2.473 km² dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, yang diproyeksikan mencapai 2,9 juta jiwa pada tahun 2020.

IV. Konsep Dasar Proyek

Pada dasarnya Proyek JICA Mamminasata ini mendukung inisiatif lokal yaitu inisiatif untuk membangun Metropolitan Mamminasata yang merupakan inisiatif Pemprov Sulsel yang telah membentuk Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM) pada tahun 2003. Metropolitan Mamminasata ini telah diakui sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam PP Tentang RTRWN (PP No. 26/2008) dan Perpres tentang RTR Mamminasata sudah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kegiatan utama proyek ditujukan untuk mempersiapkan BKSPMM dan aparat terkait Penataan Ruang di kawasan Metropolitan Mamminasata untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Perpres RTR Mamminasata.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan proyek ditetapkan 4 output, yaitu 1) Tersusunnya Prosedur Manajemen Pembangunan Perkotaan di UPTD MM/BKSPMM, Provinsi, Kota dan Kabupaten; 2) Berkembangnya Perangkat untuk Manajemen Pembangunan Perkotaan; 3) Tersusunnya Sistem Pelaksanaan Pelatihan tentang Manajemen Pembangunan Perkotaan; 4) Meningkatnya Kapasitas Koordinasi UPTD MM/BKSPMM (dalam Merumuskan Mekanisme Implementasi dan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Lintas Kab./Kota).

V. Jangka Waktu Proyek

Proyek ini berlangsung dari Maret 2009 sampai dengan Februari 2012.

VI. Stakeholder

UPTD MM adalah unit kerja di Dinas Tarkim Sul-Sel dengan tugas utama penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di Mamminasata. UPTD MM adalah counterpart utama Proyek dalam kegiatan sehari-hari. Selama Proyek berlangsung, telah dilakukan alih pengetahuan melalui berbagai kegiatan seperti OJT, pelatihan, dll sebagai bentuk pengembangan kapasitas. UPTD MM secara aktif turut serta dalam penyusunan manual, rencana aksi, pelatihan, dll.

BKSPMM adalah badan fungsional dengan tugas utama melakukan koordinasi dan konsultasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan di Mamminasata. BKSPMM adalah counterpart Proyek dalam hal koordinasi, konsultasi dan fasilitasi. Selama Proyek berlangsung, telah dilakukan alih pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Narasumber BKSPMM berperan aktif dalam berbagai kegiatan proyek.

SNVT MM adalah perpanjangan tangan pusat (Kemen. PU) di Mamminasata. Tugas utamanya adalah membantu kelancaran pelaksanaan program nasional di daerah ini mengingat statusnya sebagai KSN. Meskipun baru ditetapkan, instansi ini sejak awal melakukan sinkronisasi dan berkolaborasi dengan Proyek.

Meski berbeda organisasi, ketiganya memiliki perhatian dan fungsi yang sama: akselerasi pelaksanaan pembangunan di Mamminasata. Dalam Proyek ini, ketiganya telah melakukan koordinasi satu sama lain dan bekerjasama dalam sejumlah program dalam rangka membangun Mamminasata demi tercapainya peningkatan di kawasan ini. Diharapkan hubungan dan koordinasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Inisiatif dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Kordinasi dengan Pemerintah Pusat

BKSPMM yang telah di SK-kan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2003 memperoleh fasilitas kantor baru dari pemerintah provinsi agar kegiatan semakin terfokus dan mudah dalam melakukan kordinasi. Kordinasi antara Proyek, Pemda dan Pemerintah Pusat dilakukan secara rutin dan proaktif.

Kantor baru yang dilengkapi ruang rapat tersebut saat ini digunakan bersama dengan Proyek JICA Mamminasata.



Peresmian kantor baru oleh Ketua BKSPMM (Wakil Gubernur Sulsel) Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS.



Proyek JICA dan Dinas Tarkim Sulsel berkolaborasi pada pameran Tata Ruang Nasional. Ketua Penasehat JICA Mamminasata memberikan penjelasan kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang Bapak Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc. pada acara World Town Planning Day di Bali.

Perangkat Manajemen Perkotaan

Mengelola Kawasan Perkotaan membutuhkan perangkat Manajemen Perkotaan yaitu regulasi, pedoman, manual dan database. Khusus untuk mengefektifkan Manajemen Perkotaan Metropolitan Mamminasata disusun manual yang pada dasarnya merupakan rangkuman dari peraturan dan pedoman yang ada dan penyesuaian isi pedoman dengan kondisi khas Mamminasata. Pihak counterpart (BKSPMM, UPTD Mamminasata dan SNVT MM) turut menyusun manual agar lebih mudah diaplikasikan. Pihak Kabupaten turut berpartisipasi dalam uji coba serta revisi-revisinya.



Manual RTRW



Manual RDTR



Manual Pengendalian



Manual Sistem Manajemen Database

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Anggota BKSPMM dan aparat UPTD Mamminasata perlu membekali diri dengan dasar dan pengetahuan yang up to date terkait Manajemen Perkotaan. Dalam tiga (3) tahun terakhir, banyak aturan baru ditetapkan yang didasarkan pada UU No. 26 tahun 2007. Serangkaian pelatihan telah dilaksanakan yang berpuncak pada TOT Manajemen Perkotaan bagi aparat tingkat Provinsi. Saat ini para pelatih yang telah lulus TOT telah mulai turun ke Kabupaten untuk memberikan penataran.



Assesmen kebutuhan pelatihan dengan Lokakarya bersama BKSPMM dan Tenaga Ahli

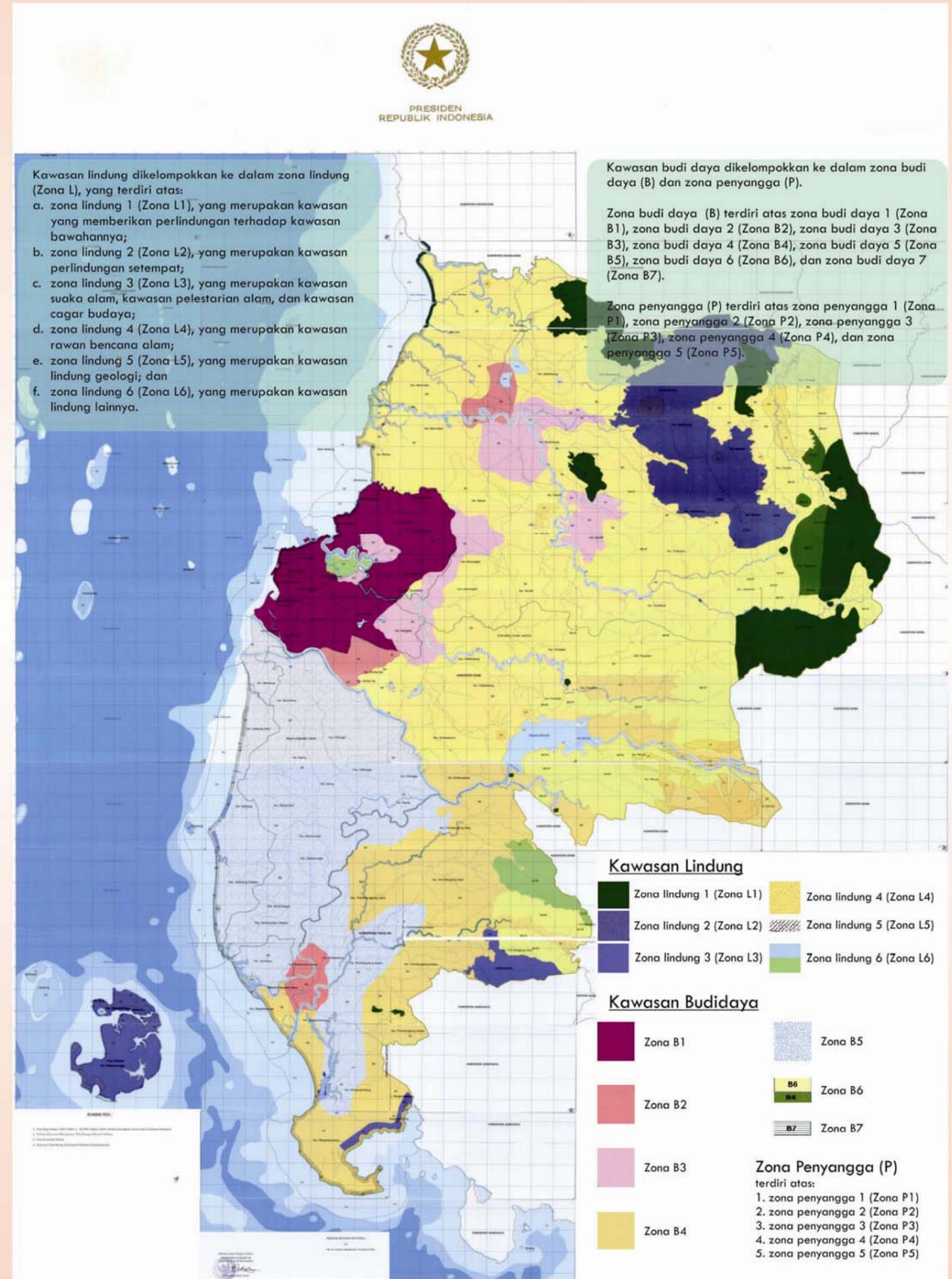


Kegiatan pengumpulan data lapangan dengan menggunakan GPS sebagai tugas lapang pelatihan GIS-Database.

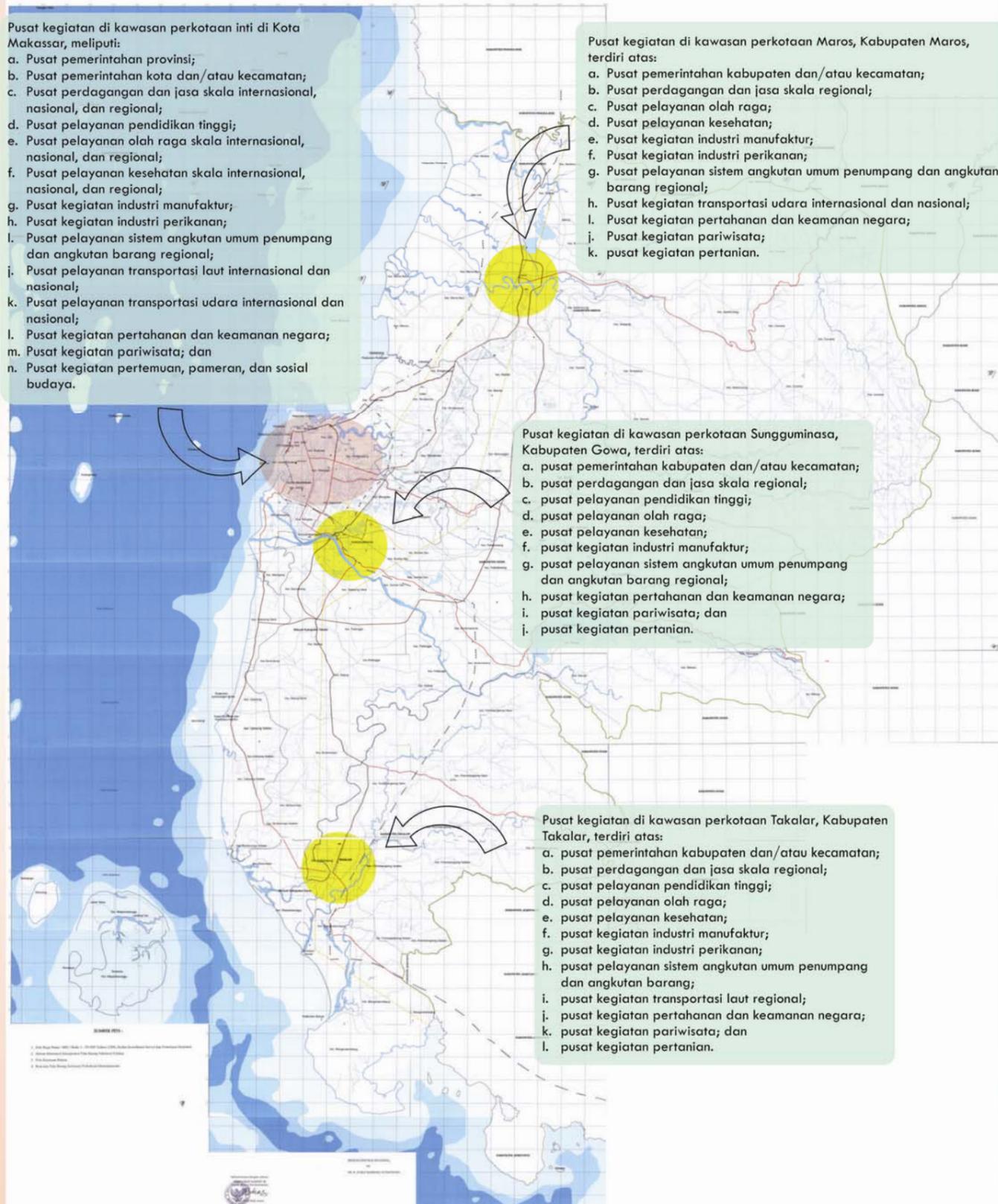


Pelatih lulusan TOT telah aktif melaksanakan pelatihan di Kabupaten se-Mamminasata.

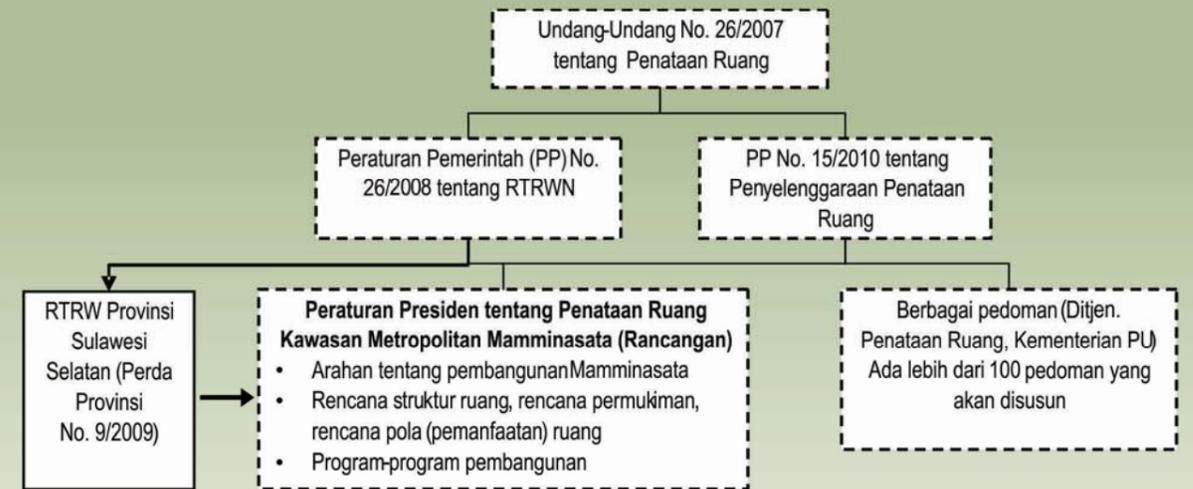
Peta Pola Ruang



Peta Struktur Ruang



Konsep Dasar Proyek sehubungan dengan Penataan Ruang Metropolitan Mamminasata



- Tindakan yang perlu dilakukan setelah diterbitkannya Perpres (Instruksi dalam Perpres)**
- Penyusunan rencana detail dengan peraturan zonasi dan instrumen pengendalian
 - Implementasi program pembangunan
 - Penguatan kelembagaan, pembinaan (termasuk manajemen database), pengawasan (pemantauan, evaluasi, pelaporan): BKSPMM, UPTD, Gubernur
 - Penyusunan dokumen hukum tentang peraturan zonasi, instrumen pengendalian (regulasi)
 - Perangkat insentif dan disinsentif

Dukungan Teknis JICA

Output 1: Tersusunnya Prosedur Manajemen Pembangunan Perkotaan di UPTD MM/BKSPMM, Provinsi, Kota dan Kabupaten

- Merampungkan prosedur manajemen pembangunan perkotaan

Output 2: Berkembangnya Perangkat untuk Manajemen Pembangunan Perkotaan

- Melaksanakan studi kasus untuk topik yang terpilih
- Merampungkan manual (RTRW, RDTR, perizinan pengembangan lahan)
- Menindak lanjuti pengesahan manual
- Merampungkan sistem manajemen database

Output 3: Tersusunnya Sistem Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Pembangunan Perkotaan

- Melaksanakan pelatihan ke kabupaten/kota
- Mereviu, meningkatkan dan merampungkan program pelatihan (silabus, materi, jadwal, penanggung jawab, anggaran)

Output 4: Meningkatnya Kapasitas Koordinasi UPTD MM/BKSPMM (dalam Merumuskan Mekanisme Implementasi dan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Lintas Kab./Kota)

- Merampungkan sistem monitoring program : prosedur, lembar monitoring, pertemuan rutin BKSPMM
- Kota Baru: memperbaiki RDTR, pembagian peran, koordinasi
- Go-Green: dukungan Rencana Induk, rencana kegiatan, koordinasi

Komponen Proyek (Output Proyek)

Proyek Kerjasama Teknis untuk Peningkatan Manajemen Pembangunan Perkotaan di Kawasan Metropolitan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan Proyek

Terbangunnya sistem manajemen pembangunan perkotaan di Kawasan Metropolitan Mamminasata

Kegiatan untuk Output 1

- Menyusun prosedur penyusunan dan penetapan rencana tata ruang/rencana detail tata ruang/rencana tata ruang kawasan strategis
- Menyusun prosedur perizinan pembangunan perkotaan (draft)
- Menyusun sistem pengelolaan data untuk pembangunan perkotaan (draft)
- Menyusun prosedur pelaksanaan koordinasi untuk merumuskan kerangka/mekanisme proyek-proyek lintas wilayah
- Mendukung sosialisasi Perpres RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata

Kegiatan untuk Output 2

- Menyusun manual untuk penyusunan RTRW dan RDTR Kab/kota (draft)
- Merumuskan rencana tata ruang sebagai studi kasus /OJT dan mengidentifikasi hal-hal yang akan ditingkatkan dalam manual (draft)
- Menyusun konsep regulasi tentang perizinan pembangunan perkotaan (draft)
- Mengkaji proposal proyek pembangunan perkotaan berdasarkan draft regulasi sebagai studi kasus /OJT
- Menyusun konsep sistem pengelolaan data untuk pembangunan perkotaan (draft)
- Menyusun kumpulan data dalam sistem manajemen data (model)
- Menerapkan sistem (model) untuk evaluasi dan OJT
- Merampungkan manual, regulasi dan sistem manajemen data

Kegiatan untuk Output 3

- Melaksanakan Training for Trainers (TOT) (untuk anggota UPTD MM/BKSPMM)
- Menyusun kurikulum / silabus pelatihan dan materi pelatihan tingkat Kab/Kota
- Melaksanakan pelatihan tingkat Kab/kota termasuk pelatihan uji coba
- Memantapkan dan merampungkan sistem pelatihan

Kegiatan untuk Output 4

- Mengidentifikasi sektor untuk studi kasus tentang perumusan kerangka/mekanisme implementasi
- Melaksanakan kuliah/ceramah tentang manajemen proyek
- Melaksanakan studi kasus untuk mempelajari sistem koordinasi yang baik termasuk kordinasi antar kab/kota, provinsi dan pemerintah pusat
- Mengidentifikasi kawasan lintas wilayah untuk studi kasus/OJT tentang penyusunan RDTR
- Melaksanakan kuliah/ceramah tentang perencanaan pembangunan perkotaan
- Mengembangkan konsep RDTR sebagai studi kasus /OJT

Tahap 1

Kondisi Eksisting Kawasan Mamminasata & Kapasitas Kelembagaan (April 2009 - Agustus 2009)



Workshop untuk menggali isu-isu tentang Mamminasata



Penjelasan oleh tenaga ahli JICA untuk para counterpart



Penyusunan konsep sistem pelatihan pembangunan perkotaan



Peninjauan lokasi Kota Baru

Tahap 2 Implementasi Pengembangan Kapasitas

Penyiapan Perangkat (Oktober 2009 – Februari 2010)



Penjelasan mengenai kemajuan Proyek JICA Mamminasata ke Dirjen Penataan Ruang oleh Kepala Penasehat



Penyusunan konsep sistem perizinan pembangunan



Pelatihan di Jepang, saat mempelajari tentang kawasan hijau perkotaan di kota Kamakura, Jepang



Rapat BKSPMM mengenai 11 program prioritas, dipimpin oleh Ketua BKSPMM H. Agus Arifin Nu'mang, MS.

Penyiapan Perangkat (Maret 2010 – Februari 2012)



Pertemuan JCC sebagai konsultasi dengan PU



Narasumber BKSPMM sebagai pemateri dalam Sosialisasi Perpres Nomor 55 tahun 2011



Studi kasus untuk penyusunan RDTR



Tersedianya manual-manual untuk penyusunan penataan ruang



Pelaksanaan TOT untuk aparat tingkat provinsi oleh JICA



Pelaksanaan pelatihan di tingkat kab./kota oleh alumni TOT



Pelatihan Konsolidasi Lahan yang dilaksanakan bagi aparat pemerintah provinsi dan kab./kota



Penandatanganan Nota Kesepahaman Kota Baru